

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Solopos

Wilayah Berita : Kabupaten Blora

Halaman 14

Bayar Bunga Bank, Pemicu Kerugian BUMD

BLORA - Iklim perekonomian global yang tidak menguntungkan pada rentang tahun 2009 silam, membuat mata uang dolar sangat sulit didapatkan dan berakibat nilai tukar rupiah ke dolar sangat tinggi.

Kondisi yang tidak menguntungkan itu, memaksa PT. ABSJ selaku investor yang bekerjasama dengan PT. Blora Patra Hulu (BPH), melakukan perubahan perjanjian. Hal tersebut tentu saja memicu kerugian sesuai hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Penjelasan tersebut diungkapkan mantan Komisaris Utama PT. BPH Sutikno Slamet.

Perubahan perjanjian dilakukan, karena iklim perekonomian global tidak menguntungkan bisnis di dunia perminyakan.

Selain itu, juga disusul

naiknya suku bunga pinjaman bank. Karena situasi ekonomi tidak menentu, pihak investor atau PT ABSJ mengajukan keringanan pembayaran beban kerjasama bunga bank.

"Kemudian PT BPH diminta turut menanggung biaya pembayaran bunga bank tersebut. Kondisi ini bisa dicek di Bank tahun 2009 terjadi krisis perekonomian global," ujar Sutikno Selasa (20/3).

Selain dipicu perubahan kerjasama, kata Sutikno, biaya eksplorasi kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di wilayah kerja pertambangan (WKP) Blok Cepu yang dilakukan Exxon, juga tidak sesuai dengan prediksi modal awal PT ABSJ.

Menurut Sutikno, bunga bank dibayar dari hasil keuntungan produksi. Dalam hal ini, bunga Bank yang menjadi beban kerjasama ditanggung kedua belah

Kondisi ekonomi saat itu sulit, nilai tukar rupiah ke dolar tinggi. Padahal untuk melakukan cash call ke Exxon pembayarannya dibayar dengan dolar bukan rupiah. ABSJ meminta keringanan, salah satunya pembayaran beban bunga Bank, kalo tidak salah runtutanya seperti itu."

Sutikno Slamet

Mantan Komisaris Utama PT. BPH

pihak, yang kini oleh BPK dianggap sebagai potensi kerugian.

Mengingat pembayaran bunga bank tersebut seharusnya menjadi pendapatan atau keuntungan BPH, imbuh Sutikno, namun harus disetor ke Bank untuk

pembayaran beban kerjasama akibat dari perubahan (adendum) kerjasama.

"Kondisi ekonomi saat itu sulit, nilai tukar rupiah ke dolar tinggi. Padahal untuk melakukan cash call ke Exxon pembayarannya dibayar dengan dolar bukan rupiah. ABSJ meminta keringanan, salah satunya pembayaran beban bunga Bank, kalo tidak salah runtutanya seperti itu," terang Sutikno.

Namun demikian, lanjut Sutikno, dalam kasus perjanjian kerjasama tersebut, masih bisa kembali keperjanjian lama. Sebab terdapat komitmen antara PT ABSJ dan PT BPH jika kondisi perekonomian sudah membaik, perjanjian akan kembali ke awal.

Sutikno juga sependapat dengan keinginan Bupati Blora Djoko Nugroho, untuk segera mengumpulkan jajaran direksi dan komisaris BPH, baik itu pengurus lama dan baru untuk menyelesaikan permasalahan pelik di tubuh badan usaha milik daerah (BUMD) milik Pemkab Blora.

"Saya sudah tua mas, dua bulan lagi mau pensiun. Saya coba ingat ingat lagi dan nanti masalah ini akan kami rembug dengan pihak pihak terkait, agar tidak berlarut larut," pintanya.

Untuk diketahui, BPK RI temukan potensi kerugian di PT BPH sebesar USD 5.048.973,51. Jika

merujuk nilai tukar dolar saat itu dengan nilai rupiah dikisaran Rp 13.500, maka potensi kerugian setara Rp 68 Miliar.

Temuan tersebut dihitung sampai dengan tahun 2014, yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan (LPH) nomor 179/LHP/BPK/18XVIII. SNG/12/2015.

Salah satu temuan BPK yang tertuang di LHP menyebutkan, potensi kerugian disebabkan adanya perubahan perjanjian kerja sama antara PT BPH dan PT ABSJ selaku pihak investor. **(feb/rif)**